

Partai Politik, *a Necessary Evil*

Terdapat lusinan definisi partai politik yang telah dikemukakan oleh banyak ilmuwan politik. Satu diantaranya dari seorang ilmuwan politik Amerika, Antony Down, bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang berusaha untuk mengontrol aparat pemerintah dengan memperoleh jabatan melalui pemilihan umum sesuai konstitusi (Hofmeister dan Grabow, 2011). Seorang Sarjana berkebangsaan Italia, Giovanni Sartori, mendefinisikan partai politik sebagai kelompok politik yang dapat mengidentifikasi dirinya dengan nama resmi yang muncul selama masa pemilu, dan pada pemilu (baik bebas atau terbatas) mampu memberikan calon untuk fungsi politik (Simon, 2003).

Dari sekian definisi yang berbeda-beda, kita bisa menemukan benang merah berupa partisipasi dalam pemilu dan kepentingan untuk meraih jabatan dan mandat publik sebagai ciri pokok yang dipunyai partai politik.

Mungkin kita bertanya, mengapa partai politik harus ada? Pertanyaan mendasar ini bisa dijawab dengan

melihat fungsi-fungsi partai politik. Setiap individu dalam masyarakat tentu memiliki kepentingan, kebutuhan, harapan dan pandangan yang berbeda. Di samping itu, setiap individu memiliki hak untuk menyalurkan pendapatnya melalui kompetisi yang damai. Kontestasi kepentingan ini dalam demokrasi disebut sebagai "*competition theory*". Di sini partai politik berfungsi sebagai *aggregator* dan *articulator* kepentingan sosial (Budiardjo, 2008). Selaku *aggregator*, partai berusaha menampung kepentingan dari segenap lapisan masyarakat. Lalu, berbagai kepentingan tersebut digabungkan, diolah dan dirumuskan dalam bentuk teratur.

Fungsi selanjutnya, partai sebagai promotor sosialisasi politik dan wadah partisipasi masyarakat. Partai menciptakan *link* antara masyarakat dan sistem politik (Hofmeister dan Grabow, 2011). Partai juga menjadi sarana rekrutmen pejabat publik. Di Indonesia, presiden dan anggota DPR harus melalui partai politik. Bahkan jabatan penting seperti Ketua KPK, Ketua MK, MA, Panglima TNI, Kapolri, Presiden BI harus melalui *fit and proper test* di DPR yang notabene utusan partai politik.

Partai politik mempunyai peran besar menentukan hitam-putih negeri ini.

Lahirnya Partai Politik

Lairnya partai politik dapat dilihat dari dua teori; *social cleavage* dan *tabula rasa theory*. *Social cleavage theory* mengasumsikan kemunculan partai politik berasal dari belahan sosial yang secara historis terjadi dalam masyarakat. Lipset dan Rokkan merumuskan empat jenis *cleavage*: (1) *centre/periphery*, (2) *religious/secular*, (3) *urban/rural*, dan (4) *capital/labour* (Kitschelt, 1995).

Tiga dari empat *cleavage* sosial yang dijabarkan oleh Lipset dan Rokkan terbentuk di Indonesia pada periode yang berbeda. Dua jenis *cleavage*, yakni *cleavage* keagamaan (*religious/secular*) dan *cleavage* regional terbentuk selama masa kolonial, sementara *cleavage* kelas muncul pada periode Orde Baru (Ambardi, 2009).

Pada awal abad ke-20 munculnya Budi Utomo (1908) dan Sarekat Dagang Islam (1904) menjadi awal lahirnya *cleavage* keagamaan. Partai yang lahir dari *cleavage* keagamaan ini adalah PNI sebagai wakil golongan nasionalis sekuler dan Partai Masyumi, Partai NU yang mewakili golongan nasionalis Islami. Di sisi

lain, *cleavage* regional (*center/periphery*), Jawa-luar Jawa, baru menonjol setelah pemilu 1955. Adapun *cleavage* kelas (*capital/labour*) diwakili oleh PKI. Ia mencoba menarik garis tegas yang membedakannya dengan partai-partai lain yang cenderung membagi masyarakat pemilih berdasarkan pemilihan vertikal. PKI mencoba membangun basis sosialnya berdasarkan kaum buruh, pembagian kelompok masyarakat secara horizontal (*Ibid*: 49).

Teori kedua dikembangkan oleh Kitschelt (1995) dan Markowski (1997). Menentang teori pertama, menurut *tabula rasa theory* kemunculan partai tak banyak dipengaruhi oleh dimensi sejarah pembelahan sosial (*cleavage*). Kekacauan kondisi sosial dan instabilitas relasi ekonomi adalah kondisi yang membidani lahirnya partai politik (Márkus, 1998: 6).

Teori ini dapat kita gunakan untuk memotret fenomena menjamurnya partai politik pada pemilu 1999 sebagai pemilu pertama pasca revormasi di saat kondisi sosio-ekonomi dan politik belum sepenuhnya pulih setelah Indonesia baru saja melewati titian reformasi.

Ada lebih seratus partai yang mendaftarkan diri menjadi kontestan pemilu 1999 namun hanya 48 partai yang lolos. Artinya, ada 45 partai pendatang baru yang

lolos. Sebelumnya, selama pemerintahan Orde Baru setelah adanya kebijakan fusi partai (1973) hanya ada 3 kontestan pemilu, dua partai politik; PDI dan PPP plus satu Golongan Karya.

Gejala Deparpolisasi

Partai politik adalah komponen penting dalam sistem demokrasi. Partai berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, sosialisasi politik, manajemen konflik dan lain-lain (lihat Budiardjo, 2008: 405-9). Kita belum bisa membayangkan berdemokrasi tanpa partai politik. Begitu pentingnya eksistensi partai politik bisa dibaca dari pernyataan berikut, *“democracy without parties seems unthinkable to most citizens”* (Dalton dan Weldon, 2005).

Meskipun demikian, baik di Barat maupun di Indonesia sendiri mulai muncul gejala deparpolisasi. Deparpolisasi adalah fenomena psikologis yang menurunkan kepercayaan publik terhadap partai (Muhtadi, 2013).

Survei opini publik untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap partai politik telah dilakukan oleh Dalton dan Weldon (2005) dengan menanyakan dua pertanyaan penting terhadap responden. (1) apakah partai

dibutuhkan dalam demokrasi, dan (2) apakah partai peduli terhadap apa yang orang-orang pikirkan. Hasilnya, dari 13 negara demokrasi¹ rata-rata 76 persen masyarakat menyatakan partai politik adalah kebutuhan dan hanya 30 persen yang menyatakan partai politik peduli terhadap apa yang dipikirkan masyarakat. Bahkan di Jerman disparitasnya sangat besar, 80 persen masyarakat menganggap partai adalah kebutuhan namun hanya 18 persen yang menyatakan partai peduli aspirasi rakyat.

Di Indonesia, Indikator Politik Indonesia menemukan gejala deparpolisasi yang semakin menguat di tingkat massa. Gejala ini ditandai dengan terus merosotnya *party ID* di kalangan pemilih. *Party ID* atau *party identification* adalah perasaan psikologis seseorang bahwa dia merasa dekat dengan partai tertentu (Mujani. dkk, 2012). Temuan terakhir survei Indikator pada bulan April 2014, masyarakat yang merasa dekat dengan partai sebesar 15 persen sementara 85 persen sisanya merasa tidak dekat.

¹ 13 negara demokrasi ini adalah: Australia, Britain, Canada, Denmark, Germany, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, USA.

Terkuaknya kasus korupsi yang melibatkan beberapa pucuk pimpinan partai menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap partai terus merosot. Partai selalu dipersepsikan sebagai institusi politik yang paling korup mengalahkan lembaga politik lainnya. Meskipun demikian, partai politik tetap menjadi kebutuhan bagi berjalannya sistem demokrasi di Indonesia. Bagi Hofmeister dan Grabow (2011), *despite all the weaknesses of parties and in spite of all the challenges that parties have to face, one thing remains certain: without parties, democracy can not function*. Bisa dimaklumi jika Bale dan Robert (2007) mengatakan bahwa partai adalah kejahatan yang diperlukan (*a necessary evil*) (Dalton dan Weldon, 2005).

Gejala deparpolisasi dan rendahnya ikatan pemilih dengan partai merupakan wabah yang menjangkiti partai politik akhir-akhir ini. Beberapa ‘efek samping’ yang timbul dari gejala ini akan kami jelaskan.